



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
SUB UNIT KERJA : RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL KADIR**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA**
3. NHK : **67897**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.032.801.000**

1. Tanah Seluas 15981 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 319.620.000
2. Tanah Seluas 6177 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/66 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 170.907.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/45 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 453.120.000
5. Tanah Seluas 5766 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/228 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 396.450.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/36 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 660.384.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/80 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 562.320.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. ---**

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 554.875.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.756.792.048
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.344.468.048
III. HUTANG	Rp.	355.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.989.268.048

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.